

## **STUDI TENTANG PELAYANAN INFORMASI PASAR KERJA (IPK) PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA**

**HASRIANTI ULAN DARIAH<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu analisis data model interaktif yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.*

*Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis melakukan penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Adapun indikator dalam penelitian ini adalah prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, sarana dan prasarana layanan serta petugas pemberi layanan serta faktor penghambat dalam pelayanan informasi pasar kerja (IPK).*

*Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pelayanan informasi pasar kerja (IPK) di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik namun perlu di tingkatkan. Prosedur yang dijalankan sesuai dengan SOP (standar operational prosedur) mulai dari pencari kerja atau pengguna tenaga kerja datang dan kemudian mengisi formulir yang telah disediakan kemudian waktu yang diberikan dalam pelayanan ini kurang lebih 10 menit dan tanpa di pungut biaya, sarana dan prasarana yang disediakan cukup memadai disertai dengan ruang tunggu yang nyaman dan adanya pengumuman info lowongan kerja, dan petugas pemberi layanan sangat baik dan ramah, kemudian faktor yang menjadi penghambat sering terjadi komputer yang eror, akses internet yang lambat, dan lampu listrik yang padam*

**Kata Kunci : *Pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK).***

### **Pendahuluan**

Dewasa ini tingkat pengangguran setiap tahunnya semakin meningkat dan hal ini merupakan permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara bersama – sama untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan cara membuka lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja seluas – luasnya bagi masyarakat.

Untuk membuka lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja tersebut diperlukan keterlibatan dari semua pihak baik itu instansi swasta maupun negeri karena dengan adanya keterlibatan dari semua pihak dapat membantu

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: wulanstrowberry@yahoo.co.id

mengurangi angka pengangguran dengan memberikan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Pekerjaan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara untuk memperoleh dan mendapatkannya karena pekerjaan sebagai dasar bagi seseorang dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak baik baik dirinya sendiri maupun keluarganya.

Atas hal tersebut, pemerintah perlu memberikan perhatian dan kebijakan dalam menangani masalah ketenagakerjaan maupun dalam penyediaan lapangan kerja serta informasi pasar kerja guna mewujudkan pemerataan kesempatan kerja bagi penduduknya.

Banyaknya para pencari kerja maupun tenaga kerja yang ingin memperoleh atau mendapatkan informasi mengenai pekerjaan tentunya akan berpengaruh dari segi pelayanan yang mana para pencari kerja tersebut ingin memperoleh dan mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien guna mendapatkan informasi mengenai pekerjaan yang dibutuhkannya.

Berkaitan dengan pelayanan publik serta ketenagakerjaan maka dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda sebagai salah satu pelaksana satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diberikan tanggung jawab oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan mengenai ketenagakerjaan di Kota Samarinda dan salah satu pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja tersebut adalah pelayanan informasi pasar kerja (IPK).

Pelayanan informasi pasar kerja atau yang sering disebut IPK merupakan suatu kegiatan yang diperuntukkan bagi para pencari kerja maupun pengguna tenaga kerja untuk memperoleh atau mendapatkan informasi mengenai pekerjaan yang diinginkan serta untuk memperoleh informasi bagi pengguna tenaga kerja dalam mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan bagi perusahaannya.

Kebutuhan akan tersediannya tenaga kerja yang dibutuhkan bagi pengguna tenaga kerja sangat diperlukan guna mencari tenaga kerja yang diinginkan begitu juga dengan tenaga kerja yang mana para pencari kerja dapat mengetahui tentang tempat atau perusahaan –perusahaan yang diinginkannya oleh karena itu sangat diperlukan yang namanya informasi pasar kerja (IPK).

Namun dalam kegiatannya saat ini mengenai pelayanan informasi pasar kerja (IPK) yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda terdapat beberapa kendala diantaranya pelayanan informasi kerja yang lambat, ruang tunggu yang kurang nyaman, dan lain sebagainya.

Hal ini tentu saja membuat pelayanan informasi pasar kerja yang dilaksanakan oleh dinas tersebut kurang cepat, tepat, dan efisien dari segi pelayanannya maupun proses kerjanya.

Untuk itu diperlukan, adanya suatu pelayanan yang baik dan memuaskan bagi pencari kerja maupun pengguna tenaga kerja agar informasi yang

dibutuhkan tersebut mengenai pekerjaan dapat tepat sasaran dan efektif dengan baik serta memberikan kepuasan bagi masyarakat.

Pelayanan informasi pasar kerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang ketenagakerjaan kepada pencari kerja yang membutuhkannya. Pelayanan informasi pasar kerja (IPK) tersebut tidak bisa diterapkan secara cepat dan tepat untuk itu diperlukan partisipasi dari semua pihak di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda untuk membuat pelayanan yang cepat dan praktis sehingga para pencari kerja maupun pengguna tenaga kerja dapat dengan mudah mengakses informasi – informasi mengenai pekerjaan yang dibutuhkan atau diinginkan.

Dengan adanya pelayanan informasi pasar kerja (IPK) ini diharapkan masyarakat pencari kerja dapat memperoleh layanan yang memuaskan mengenai bursa kerja atau pasar kerja sesuai dengan kebutuhan pencari kerja yang diinginkannya dan untuk instansi atau perusahaan pengguna tenaga kerja dapat memperoleh tenaga kerja sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan pengamatan penulis dari latar belakang diatas terlihat bahwa pelayanan informasi pasar kerja (IPK) masih belum optimal untuk itu penulis tertarik untuk mengambil judul mengenai “*Studi Tentang Pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK) Pada Dinas Tenaga Kerja Di Kota Samarinda.*”

### ***Rumusan Masalah***

1. Bagaimanakah pelayanan informasi pasar kerja (IPK) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda ?.
2. Apa saja faktor penghambat pelayanan informasi pasar kerja (IPK) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda ?.

### ***Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui pelayanan informasi pasar kerja (IPK) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor penghambat pelayanan informasi pasar kerja (IPK) di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.

### ***Manfaat Penelitian***

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dalam memberikan pelayanan mengenai informasi pasar kerja kepada masyarakat serta dapat berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya bidang Administrasi Negara.

2. Manfaat Akademis

Sebagai bahan acuan atau referensi bagi penelitian sejenis yang akan datang serta dapat dijadikan sebagai bahan pustaka di Universitas Mulawarman.

## **Kerangka Dasar Teori**

### **Teori Dan Konsep**

#### ***Pelayanan***

Menurut Moenir (2002 : 26), istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah *service* mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.

Menurut Luqman (2000 : 6), pelayanan adalah sesuatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Menurut Harbani Pasolong (2010 : 128), pelayanan pada dasarnya didefinisikan sebagai aktifitas seseorang dan / atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.

#### ***Pelayanan Publik***

Menurut Aswin (2000 : 33), pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak – hak dasar setiap warganegara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.

Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009 : 19) pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### ***Standar Pelayanan Publik***

Menurut Aswin (2000 : 67) mengungkapkan tentang standar pelayanan publik sekurang – kurangnya meliputi :

- a. Prosedur pelayanan  
Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
- b. Waktu penyelesaian  
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- c. Biaya pelayanan  
Biaya / tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

e. Sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik.

f. Kompetensi petugas pemberi layanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

### ***Kualitas Pelayanan Publik***

Menurut H.A.S. Moenir (2006 : 205) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu yang kompleks, sehingga untuk menentukan sejauhmana kualitas dari pelayanan tersebut dapat dilihat dari lima dimensi, yaitu antara lain :

- a. *Reliability*, kemampuan untuk memberikan secara cepat, tepat, dan benar. Jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada konsumen atau pelanggan.
- b. *Responsiveness*, kesadaran atau keinginan untuk membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat.
- c. *Assurance*, pengetahuan atau wawasan, kesopansantunan, kepercayaan diri, dari memberi layanan serta respect terhadap konsumen.
- d. *Emphaty*, kemauan pemberi layanan untuk melakukan pendekatan, memberikan perlindungan serta berusaha untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.
- e. *Tangibles*, penampilan dari pegawai dan fasilitas fisik lainnya, seperti peralatan atau perlengkapan yang menunjang pelayanan.

### ***Pelayanan Informasi Pasar Kerja***

Menurut Tjetje Al Anshori (2008 : 13), informasi pasar kerja dalam arti sempit adalah informasi yang bermanfaat untuk mempermudah penempatan pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja dan di pihak lain lowongan kerja dapat terisi secara tepat waktu, tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : Per.07/MEN/IV/2008 Pasal 1 tentang penempatan kerja mengungkapkan bahawa informasi pasar kerja yang selanjutnya disebut IPK adalah keterangan mengenai karekteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja.

Berdasarkan dari pengertian – pengertian atau teori – teori yang telah disampaikan mengenai pelayanan informasi pasar kerja (IPK) maka penulis dapat menyimpulkan bahwasannya pelayanan informasi pasar kerja atau yang dikenal dengan IPK merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas

Tenaga Kerja dalam rangka pemberian informasi mengenai pasar kerja yang dibutuhkan oleh para pencari kerja maupun pengguna tenaga kerja.

### ***Definisi Konseptual***

Pelayanan Informasi Pasar Kerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang ketenagakerjaan kepada pencari kerja yang membutuhkan serta pengguna tenaga kerja yang meliputi prosedur pelayanan, waktu pelayanan, sarana dan prasarana layanan, dan petugas pemberi layanan. Agar dalam pelayanan yang dilakukan tidak mengalami kendala dan mempermudah proses kegiatan.

### ***Metode Penelitian***

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisis data model interaktif dari Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman (1992 : 16), yaitu teknik analisis data yang terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Berikut penjelasan dari alur kegiatan dari analisis model interaktif tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan atau *verifikasi*

### ***Fokus Penelitian***

1. Pelayanan informasi pasar kerja (IPK) pada Dinas Kota Samarinda dengan indikator yang meliputi :
  - a. Prosedur pelayanan.
  - b. Waktu pelayanan.
  - c. Biaya pelayanan.
  - d. Sarana dan prasarana layanan.
  - e. Petugas pemberi layanan.
2. Faktor – faktor penghambat pelayanan informasi pasar kerja (IPK) pada Dinas Kota Samarinda.

## **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### ***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 023 11 Tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Dinas Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda. Dinas Tenaga Samarinda berfungsi sebagai pembantu Walikota dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah

dan tugas bantu di bidang Ketenagakerjaan dan merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kota Samarinda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda.

### ***Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda***

#### **1. Visi**

Mewujudkan Angkatan Kerja Yang Produktif, Proporsional Dan Mandiri Serta Menciptakan Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Berkeadilan.

#### **2. Misi**

Untuk mewujudkan Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran. Adapun misi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, yaitu sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan produktivitas dan kemandirian angkatan kerja dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran.
2. Mendorong terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, produktif, profesional, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan pendidikan/keterampilan bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita.
3. Mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara tenaga kerja dengan perusahaan.
4. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dalam aspek hukum dan profesi, ke arah peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur untuk mendukung kualitas pelayanan prima di bidang ketenaga-kerjaan dan akuntabilitas SKPD.

### **Hasil Penelitian**

#### **1. *Prosedur pelayanan***

Prosedur pelayanan di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda mengenai pelayanan informasi pasar kerjanya cukup mudah dan tidak berbelit - belit karena prosedur layanan dilakukan dengan baik secara transparan atau terbuka sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diterapkan oleh pimpinan. Prosedur pelayanan dimulai dari pencari kerja atau pengguna tenaga kerja datang langsung ke dinas tenaga kerja kota Samarinda kemudian mengisi formulir yang disediakan oleh petugas pelayanan baik itu untuk pencari kerja maupun pengguna tenaga kerja.

## **2. Waktu pelayanan**

Waktu yang disediakan untuk melakukan pelayanan sesuai dengan mekanisme yang ada dimana para pencari kerja atau pengguna tenaga kerja tidak memerlukan waktu yang sangat lama untuk dilayani hanya sekitar kurang lebih 10 menit.

## **3. Biaya pelayanan**

Biaya pelayanan yang diperlukan untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan maupun tenaga kerja tidak perlu mengeluarkan biaya atau gratis. Tidak adanya ketentuan mengenai biaya apapun itu, sehingga mempermudah para pencari kerja dari awal hingga selesai nantinya, dengan tidak adanya biaya sehingga para pencari kerja dengan mudah mengikuti persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh petugas pemberi layanan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.

## **4. Sarana dan prasarana pelayanan**

Sarana dan prasarana pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda ini cukup nyaman dan memadai terbukti dari ketersediaan formulir yang cukup, ruang tunggu yang nyaman serta area parkir yang luas dengan disampingnya terdapat papan pengumuman mengenai informasi – informasi yang berkaitan dengan lowongan pekerjaan yang berada didepan kantor dinas tenaga kerja kota samarinda.

## **5. Petugas pemberi layanan**

Petugas pemberi layanan dalam menjalankan tugasnya cukup baik yang mana pegawai atau staff pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda ini mempunyai pengetahuan, kemampuan serta keterampilan yang baik dalam melayani keperluan informasi mengenai bursa kerja atau pasar kerja.

## **6. Faktor penghambat**

Faktor yang menjadi kendala dalam proses pelayanan sering terjadinya komputer yang eror dan akses internet yang lambat hal tersebut dapat menghambat dalam proses pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien sehingga apabila akses internet tidak bisa dibuka sehingga para pencari kerja tidak efektif dalam melihat info – info lowongan pekerjaan yang ada ,dan apabila ingin lebih efektif mereka memilih melihat langsung pada papan pengumuman yang berada didepan parkir kantor dinas tenaga kerja kota samarinda, sehingga lebih cepat mengetahui apa saja lowongan-lowongan pekerjaan yang sesuai dengan minat/bakat maupun pendidikan dari pencari kerja tersebut.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian – uraian dari pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :



1. Prosedur layanan yang diterapkan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda ini mulai dari pencari kerja atau pengguna tenaga kerja datang ke Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dengan membawa persyaratan yang diperlukan kemudian petugas melayani dengan baik dan ramah tamah serta mempersilahkan pencari kerja atau pengguna tenaga kerja mengisi formulir yang telah disediakan kemudian mempersilakkannya untuk duduk dan dipanggil kembali.
2. Waktu layanan yang disediakan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda ini tidak memerlukan waktu yang lama hanya kurang lebih 10 menit dan juga untuk mendapatkan informasi mengenai pekerjaan dapat di akses di internet.
3. Biaya layanan khususnya pelayanan informasi pasar kerja (IPK) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda ini tanpa di pungut biaya.
4. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda ini cukup memadai yang mana adanya ketersediaan ruang tunggu yang nyaman untuk melakukan proses pelayanan, lapangan parkir yang luas, dan juga adanya pengumuman info kerja yang telah disediakan.
5. Petugas pemberi layanan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda ini dalam menyampaikan informasi cukup jelas dan dari segi sikap juga sangat ramah.
6. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelayanan informasi pasar kerja (IPK) ini antara lain terjadinya komputer yang eror, akses internet yang lambat, serta sering terjadinya pemadaman lampu.

### **Saran**

Sesuai dengan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran mengenai pelayanan informasi pasar kerja (IPK) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda hendaknya perlu menganggarkan untuk biaya perawatan sarana dan prasarana yang ada agar kerusakan alat yang dapat mengganggu ketepatan waktu dalam penyelesaian pelayanan dapat di minimalisir dan pelayanan dapat berjalan dengan baik dan optimal.
2. Hendaknya Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda ini perlu meningkatkan lagi kemampuan atau *skill* yang dimiliki para pegawai atau staff di lingkungan instansi ini dengan cara mengadakan diklat pengembangan diri maupun mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan teknologi dan informasi sehingga masalah yang menjadi kendala bisa teratasi dengan baik.

3. Hendaknya Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda perlu mengadakan kerjasama dengan instansi swasta atau lembaga pelatihan untuk mengadakan pelatihan bagi pegawai di lingkungan instansi ini.
4. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda hendaknya mensosialisasikan mengenai bursa kerja *on-line* baik bagi para pencari kerja maupun pengguna tenaga kerja.

### **Daftar Pustaka**

- Arman Hakim Nasution, M.Eng, Ir, 2006. "*Manajemen Industri*", CV. Andi offset., Yogyakarta.
- Aswin, 2000. "*Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Dan Pelayanan Publik*", Editor : Didi Marzuki, Pengantar : Taufik Efendi, MBA.
- B, Miles, Mathew, dan Huberman, 2009. "*Analisis Data Deskriptif Kualitatif*", Universitas Indonesia, Jakarta.
- B, Siswanto Sastrohadwiryo, Dr, 2005. "*Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*", PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Elvinaro Ardianto, Dr, M.Si, 2011. "*Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*", Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Nugroho Eko, M.Si, Ir, Dr, 2008. "*Sistem Informasi Manajemen Konsep, Aplikasi, Dan Perkembangan*", CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Gaspersz Vincent, 2003. "*Ekonomi Manajerial, Pembuaian Keputusan Bisnis*", Edisi Revisi dan Perluasan, Diterjemahkan oleh Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hasibuan Malayu, S.P, 2007. "*Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*", PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Jansen Sinamo, 2005. "*8 Etos Kerja Professional*", Institute Darma Mahardika, Jakarta
- Kasmir, SE, MM, 2008, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pasolong Harbani, 2010. "*Teori Administrasi Publik*", Alfabeta, Bandung.
- H.A.S Moenir, 2006. "*Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*", PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono, Dr, 2009. "*Metodelogi Riset Bisnis*", PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Tjiptono, Fandy, 2003. "*Manajemen Jasa*", Edisi Kedua : Cetakan Ketiga, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Profil Ketenagakerjaan ,2010." *Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda*. Jl. Basuki Rahmat no. 78.
- Pedoman Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK).2008 Jakarta.
- Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja. 2010, Jakarta.

**Dokumen – Dokumen :**

Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.07/MEN/IV/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja